

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan upaya pembelajaran untuk membantu anak-anak didik baik lahir maupun batin, untuk menuju ke arah masa depan yang lebih baik. Pendidikan juga merupakan sebuah proses untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang searah dengan nilai-nilai budaya bangsa serta Pancasila (Sujana, 2019). Menurut Bustomi (2012) pendidikan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia baik secara ekonomi maupun sosial dan salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan dalam upaya pencapaian kesetaraan dan mewujudkan kehidupan yang Makmur.

Kadi (2017) mengemukakan bahwa Pendidikan adalah sebuah investasi masa depan bagi sebuah Negara yang sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang telah menerapkan salah satu tujuan yang tertera dalam undang-undang dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang di miliki tanpa memandang status social, ras, etnis, agama, gender, dan kondisi grafis.

Ketimpangan pendidikan merupakan bagian dari program desentralisasi, perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan menetapkan undang-undang Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menggantikan undang-undang republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan pemerintah daerah. Pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 8 dinyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah ekonom berdasarkan asas otonomi (Aristo, 2019)

Ketimpangan Pendidikan merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia, hal ini di buktikan dengan adanya peningkatan dan ketimpangan

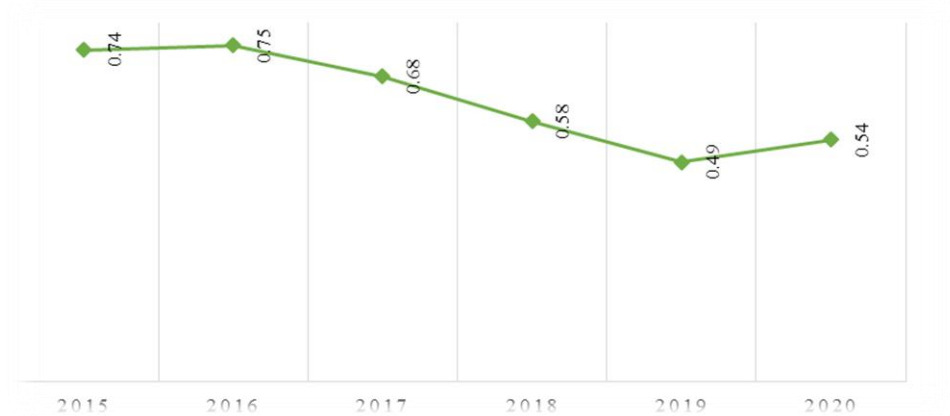
pendidikan yang di lakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini di buktikan ketika ketimpangan dalam rencana strategis melalui kebijakan pembangunan Pendidikan nasional, yaitu : ketimpangan infrastruktur Pendidikan, jalan dan kesehatan, gendergap terhadap ketimpangan pendidikan (Nanggala, 2021). Upaya serius untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui Pendidikan terus di benahi oleh pemerintah. Hal tersebut terus menjadi fokus pemerintah mengingat pentingnya peranan Pendidikan dalam upaya peningkatan ekonomi.

Di Indonesia untuk tercapainya suatu cita-cita dalam bidang Pendidikan oleh pemerintah dengan berbagai upaya seperti yang di amanatkan oleh pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. upaya yang di lakukan pemerintah tersebut berupa inovasi dalam pendidikan. Karena hal itu pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan (Kusnandi, 2017). Fungsi pendidikan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di dalam undang-undang No 20 tahun 2003 memuat segala hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia yang meliputi pendidikan, fungsi dan pendidikan, jenis-jenis pendidikan, jenjang pendidikan, standart pendidikan. Dengan demikian arah pendidikan di Indonesia sudah ditentukan dengan sedemikian rupa (Sujana, 2019).

Menurut Lukman (2016) pembangunan pendidikan di Indonesia memiliki dua dimensi yang penting dimana sering menjadi permasalahan di Indonesia yakni masalah perluasan akses pendidikan dan kedua ketimpangan pendidikan, kedua permasalahan tersebut hingga saat ini masih menjadi polemik di dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ketimpangan pendidikan di Indonesia. Perluasan ditandai dengan mudahnya masyarakat mendapatkan pendidikan. Sedang kan untk ketimpangan pendidikan adalah suatu keadaan yang sama dengan pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan baik di kota maupun di desa.

Faktor yang mempengaruhi antara lain angka tidak/belum sekolah dapat di lihat dari grafik di bawah ini untuk angka tidak/belum sekolah masih

tergolong tinggi, hal ini dapat di artikan bahwa ketimpangan pendidikan di Indonesia masih belum merata.



Sumber : Badan statistik Indonesia 2015-2020

Gambar 1. Presentase angka belum/tidak pernah bersekolah usia 7-12 tahun di Indonesia tahun 2015-2020

Disimpulkan bahwa angka tidak/belum pernah sekolah dari tahun 2015-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan 10% tetapi di tahun 2020 meningkat 0,54% hal ini mengakibatkan ketimpangan pendidikan di Indonesia masih tidak merata. Menurut Dewi, (2014) ketidakmampuan masyarakat untuk membiayai pengeluaran pendidikan atau faktor ekonomi penyebab anak putus sekolah, pada hal ini membuktikan bahwa di Indonesia tingginya masyarakat miskin yang anaknya tidak bersekolah atau putus sekolah berasal dari aspek internalnya, yaitu tidak ada keinginan dan motivasi untuk bersekolah. Untuk menciptakan mutu pendidikan, pemerintah juga harus menjamin kualitas pendidikan mulai dari, fasilitas sekolah sebagai satuan pendidikan di layanan masyarakat.

Menurut Widiansyah (2017) masalah pendidikan sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari masalah ekonomi. Baik secara langsung maupun tidak, kontribusi pendidikan terhadap ekonomi dan pembangunan harus diakui. Pendidikan harus dipandang sebagai investasi, yang secara jangka panjang kontribusinya dapat dirasakan. Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi telah berkembang pesat dan semakin diyakini oleh Negara bahwa pembangunan sector pendidikan merupakan syarat penting bagi pertumbuhan sector-sektor pembangunan lainnya.

Tujuan pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia, merupakan unsur mendasar terutama pada pembentukan kualitas sumber daya manusia. Menurut fadjri (2000) pembangunan sumber daya manusia yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari kemampuan pribadi dalam suatu masyarakat. Tujuan dari pendidikan adalah untuk memuat gambaran tentang nilai-nilai baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk suatu pengetahuan mendasar, ke mampuan dan sikap itu juga dapat dikembangkan berbagai kemampuan yang di butuhkan oleh manusia agar berpartisipasi dalam pembangunan.

Infrastruktur pendidikan juga tidak kalah pentingnya dengan pendukung agar pembangunan ekonomi serta ketimpangan pendidikan suatu Negara dapat terwujud. Infrastruktur juga menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Disuatu Negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mampu melakukan ketimpangan pembangunan kemudian melakukan pembangunan infrastruktur ke seluruh bagian wilayah. infrastruktur merujuk pada system fisik yang menyediakan bangunan sekolah, menengah, SLTA bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup pendidikan dan ekonomi (Sfira et.al, 2019)

Menurut Familioni (2004) infrastruktur dapat dibedakan menjadi 2 yaitu infrastruktur sosial dan ekokomi. Dalam infrastruktur ekonomi terdapat utilitas publik seperti listrik, sanitasi, suplai, air bersih, saluran pembuangan, gas dan telekomunikasi. Selain itu infrastruktur sosial dapat dibedakan menjadi infrastruktur pendidikan dan kesehatan. infrastruktur panjang jalan merupakan salah satu konektivitas sebagai penghubung perekonomian dari suatu tempat ke tempat lainnya. panjang jalan sangat berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan perekonomian dengan adanya akses jalan efisien biaya pengangkutan serta proses produksi dalam mendistribusikan barang. Infrastruktur jalan juga dapat dibangun oleh sektor swasta maka biaya produksi akan meningkat secara signifikan dan sehingga cost of entry pada perekonomian menjadi lebih mahal dikarenakan terealisasinya kegiatan ekonomi pada ketiadaan infradstruktur tersebut. Untuk sektor pendidikan jalan juga merupakan akses penting untuk system pembelajaran hal ini dapat

disimpulkan bahwa panjang jalan yang ditempuh ke sekolah dapat membuat anak putus sekolah dikarenakan kerusakan jalan, dan transportasi yang tidak memadai dapat membuat ketimpangan pendidikan semakin tinggi (Arifiin, 2019)

Kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Indikator pembangunan kesehatan dapat dilihat dari angka harapan hidup. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad menunjukkan bahwa angka harapan hidup berada dalam kondisi yang mengalami tren positif baik secara nasional maupun tingkat provinsi. Dalam penelitian Muhammad peringkat angka harapan hidup di Jawa Tengah berada pada posisi ke-4 dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tren positif pada bagian kesehatan nampaknya tidak dialami pada bagian pendidikan. Dalam pembangunan guna meningkatkan angka melek huruf memang telah mendapatkan hasil yang cukup tinggi, dalam penelitian Muhammad (2012) tingkat melek huruf di atas 90% pada tahun 2007 dan 2008 angka hurufnya mencapai 88,2% dan di tahun 2008 mencapai 89,24% apabila dilihat pada rata-rata tahun bersekolah, secara umum Indonesia masih berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Rata-rata tahun bersekolah yang masih berada dalam kisaran angka 7 tahun masih menjadi bukti bahwa target pendidikan dasar 9 tahun masih belum dapat terpenuhi.

Ketimpangan pendidikan juga dapat dilihat dari aspek kesetaraan gender yang terjadi di suatu daerah. Hamzah (2017) Menyatakan bahwa sektor pendidikan adalah sektor yang paling menentukan upaya perwujudan kesetaraan gender yang membuka kesempatan dan peluang berbagai bidang. Dalam penelitian yang dilakukan Hamzah (2017) angka buta huruf di Kalimantan Barat selama 5 tahun 2011-2015 ditunjukkan kondisi yang fluktuatif, dimana persentase penduduk perempuan yang buta huruf selalu lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Suratman (2014) menyatakan kebanyakan Negara berkembang, pendidikan menerima perempuan muda lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki muda. Dalam semua bagian di dunia anak-anak perempuan masih tertinggal dari anak-anak laki-laki. Sebagian orang besar orang buta aksara dan yang bersekolah di Negara-negara berkembang adalah

perempuan.pengaruh kesenjangan gender pernah diteliti oleh Hamzah, (2017) dengan kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara angka buta huruf terhadap ketimpangan pendidikan.

Rendahnya pengeluaran pendidikan dari rumah tangga untuk pembiayaan pendidikan adalah salah satu penyebab terjadinya masalah ketimpangan pendidikan. Penelitian yang dilakukan (Liao & Shen, 2011) di 38 negara dari 68 negara yang tergabung dalam project for internasional student assessment (PISA) menyebutkan bahwa sekian banyaknya variabel yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan, 22,44% dipengaruhi dari variable yang berbeda dalam ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu penelitian yang dilakukan (Tsang, 2002) menjelaskan bahwa ketimpangan pendidikan terkait gender, menjadi salah satu penyebabnya adalah oengeluaran belanja pendidikan rumah tangga. Belanja pendidikan rumah tangga menunjukkan bahwa kemampuan rumah tangga untuk membiayai pendidikan anak. Semakin tinggi tingka pendidikanya maka semakin tinggi pula pengeluaran biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan (Soejoto, 2014).

Nurjanana (2019), Upaya untuk mencapai pembangunan ekonomi, bidang pendidikan berperan sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Untuk hal ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup dimasa depan akan lebih baik.

B. Rumusan masalah

Indonesia pada saat ini dihadapkan berbagai permasalahan baik itu dari luar maupun dalam negara itu sendiri, masalah tersebut terjadi dari perubahan-perubahan yang mendunia, sebagai contoh kemajuan IPTEK, dan juga pergeseran nilai sosial di masyarakat. pendidikan sebagai lembaga yang dinamis juga merasakan dampak dari permasalahan tersebut, oleh hal itu yang membawa dampak terhadap kemajuan dan perkembangan pendidikan yaitu perubahan budaya, manusia membutuhkan pendidikan karena manusia ingin berkembang, untuk menciptakan manusia yang berkualitas maka manusia itu harus bisa berkualitas dan dapat bersaing untuk mencipkan pendidikan yang

baik, proses pembelajaran yang masih tidak sempurna menjadikan usaha pembangunan sumber daya manusia yang lambat (Paterson, 2015)

Secara rinci cita-cita nasional yang terkait dengan kegiatan pendidikan telah dituangkan dalam undang-undang sisdiknas NO 20 tahun 2003, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Arifin, 2012)

Ketimpangan menjadi isu penting melihat kondisi wilayah Indonesia, tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan menjamin perbaikan yang harus berlangsung dalam tingkat teknologi yang digunakan oleh masyarakat (Atmanti, 2005). Dalam kenyataannya hasil pendidikan yang ideal sulit diperoleh, karena adanya tataran strategi dan implementasi pendidikan mengalami masalah yang cukup kompleks seperti ketimpangan pendidikan pada masyarakat, alokasi dan pendidikan dari pemerintah dan terbatasnya sarana prasarana pendidikan.

1. Apakah infrastruktur pendidikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia ?
2. Apakah Infrastruktur kesehatan berpengaruh terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia ?
3. Apakah infrastruktur jalan berpengaruh terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia ?
4. Apakah angka buta huruf berpengaruh terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia ?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini berisi ruang lingkup tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan. Penelitian ini menganalisis pengembangan ketimpangan pendidikan di Indonesia dengan variabel infrastruktur pendidikan, jalan, kesehatan, dan angka buta huruf.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis pengaruh infrastruktur pendidikan terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia.

- b. Menganalisis pengaruh infrastruktur kesehatan terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia.
- c. Menganalisis pengaruh infrastruktur jalan terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia.
- d. Menganalisis pengaruh angka buta huruf terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia.

2. Manfaat penelitian

Kegunaan penelitian ini memuat manfaat diharapkan dari hasil penelitian baik bersifat teoritis maupun terapan. Kegunaan ditujukan untuk.

a. Manfaat teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada pembaca serta lembaga yang terkait dengan informasi ketimpangan pendidikan di Indonesia yang dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian selanjutnya di harapkan juga penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam bidang ekonomi mengenai pemecahan suatu permasalahan mengenai ketimpangan pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia.

b. Manfaat praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan sebagai gambaran serta masukan untuk pemerintahan daerah.
- 2) Diharapkan juga penelitian ini menjadi sumber data oleh pihak, pemerintah serta instansi terkait dan juga sebagai media acuan bagi masyarakat terhadap perbaikan kebijakan yang berkaitan dengan ketimpangan pendidikan.